

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pajak bumi dan bangunan di daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerah lebih terfokus untuk mencapai sasaran. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah itu sendiri. Salah satu pos PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah, pajak daerah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan alternatif yang paling berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan / penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan

kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dalam mengelola PBB, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menggunakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang setelah pengalihan SISMIOP ini dikelola oleh daerah. Sejak pengalihan, pengelolaan BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan pembayaran, Bank Pembangunan Daerah juga ditunjuk sebagai perwakilan tempat pembayaran PBB yang dalam hal ini Bank Riau Kepri (BRK) menjadi salah satu tempat alternatif untuk pembayaran PBB untuk wilayah Riau dan Kepri.

Dengan adanya kecenderungan meningkatnya pembayaran PBB di kantor cabang Bank Riau Kepri membuat para petugas kesulitan dalam melayani masyarakat. Apalagi jumlah petugas yang tersedia di loket tempat melakukan pembayaran cukup terbatas, sehingga tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani, ditambah adanya keluhan-keluhan dari masyarakat yang ingin membayar PBB. Maka demikian Bank Riau Kepri melakukan investasi *payment online system* untuk pembayaran PBB tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas, dilakukan analisa terhadap investasi yang telah dilakukan oleh Bank Riau Kepri dengan judul Analisis Investasi *Payment Online System* (POS) Untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Menggunakan Metode *Ranti's Generic IS/IT Business Value* (Studi Kasus : Bank Riau Kepri).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Apakah manfaat bisnis yang diperoleh Bank Riau Kepri dengan mengimplementasikan POS dari sisi bisnis dan finansial?"

## **1.3 Batasan Masalah**

1. Kajian investasi ini sebatas pengimplementasian POS via *Counter Teller*.
2. Data yang diolah adalah data pembayaran PBB Dispenda Kota Pekanbaru.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengukur nilai ekonomis biaya dan manfaat bisnis dari investasi sistem POS yang diimplementasikan oleh Bank Riau Kepri.

Manfaat dari penelitian yang dilakukan :

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak eksekutif dan top manajemen Bank Riau Kepri dari dilakukannya investasi sistem dan teknologi informasi.
2. Hasil analisa terhadap investasi sistem dan teknologi informasi saat ini dapat digunakan sebagai acuan untuk investasi sistem dan teknologi informasi yang akan dilakukan Bank Riau Kepri selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam bagian ini akan dijelaskan secara sekilas isi dari setiap bab mulai dari Bab 1 sama dengan Bab 5. Adapun isi setiap bab secara ringkas adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metodologi penelitian yang digunakan juga sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Merupakan penjelasan landasan ilmu yang berhubungan dengan konsep investasi, metode perhitungan atau kerugian investasi.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses penelitian, yaitu tahapan penelitian pendahuluan, identifikasi masalah, studi literatur, wawancara, jadwal penelitian, analisis dan perancangan, dan implementasi beserta pengujian.

## **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan dari analisis investasi atas penerapan sistem dan teknologi informasi

## **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian ini dapat digunakan secara optimal.